

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya bisnis property, real estate, dan konstruksi di Indonesia dikabarkan mengalami kelesuan, penurunan dan stagnan hingga pada akhir tahun 2018. Hal ini didasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jika angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan sebanyak 1% dari 4.11% ke 3.11%. Kelesuan terhadap minat bisnis property, real estate, dan konstruksi seringkali dikaitkan dengan krisis financial yang terjadi tahun 1998 yang menghancurkan perekonomian negara. Pada tahun tersebut adalah perjalanan sejarah yang tidak terlupakan mengingat perekonomian harus berhutang kepada luar negeri, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Tidak hanya krisis financial saja yang membuat jatuh namun didukung dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi saat itu menyebabkan kurangnya daya minat pembeli pada sektor ini.

Setelah Indonesia dilanda krisis moneter dimana sebagian besar pelaku usaha dalam berbagai sektor ini mengalami banyak sekali kerugian dan kemudian mereka berusaha bangkit kembali untuk mulai membangun dari awal lagi agar dapat memulihkan kondisi perekonomian negara. Disini ada upaya turun tangan dari pemerintah dengan menerapkan suatu sistem kepada para pelaku usaha tersebut agar dalam pemulihan pada setiap usahanya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Pemerintah akhirnya menetapkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) pada tahun 1999 agar dapat diterapkan di kalangan bisnis perusahaan apapun yang merupakan salah satu bentuk dari implementasi *Letter of Intent* (LOI) oleh *International Monetary Fund* (IMF). Pembentukan ini bertujuan sebagai suatu bentuk upaya agar setiap perusahaan yang berada di Indonesia dapat mengikuti standar kebijakan corporate governance ini yang akan membawa dampak pada ekonomi di Indonesia yang lebih baik.

Saat ini perusahaan diwajibkan untuk selalu menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG), karena hal tersebut adalah sistem yang bisa membuat organisasi bertumbuh dengan baik. Sebab *Good Corporate Governance* sendiri juga sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi perusahaan karena

dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif, efisien, dan efektif (Darko, Aribi, & Uzonwanne, 2016) dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan dalam suatu perusahaan (OECD, 2004). Tata kelola perusahaan dibentuk sebagaimana mengupayakan perusahaan bisa mampu bertahan selama menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan dan persaingan bisnis yang ada. Karena tanpa tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan dapat membawa pengaruh buruk untuk kedepannya. Perlakuan tata kelola perusahaan yang baik ini sering dijadikan sebagai contoh alasan yang mampu membawa perusahaan pada kejatuhan di berbagai negara. Dari hasil survey yang dilakukan *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) di sebelas negara pada pelaku bisnis asing di Asia pada tahun 2012 yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling buruk di bidang corporate governance dan relatif tertinggal. Di Indonesia kerap kali terjadi banyak kasus yang diakibatkan karena kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, seperti pada kasus PT Waskita Karya Tbk. (2009) dan PT Lippo Karawaci Tbk. (2018) dimana kedua perusahaan ini memiliki sistem tata kelola yang lemah dengan cara melanggar penerapan GCG yang biasa disebut sebagai prinsip TARIF.

Dalam kutipan CNN Indonesia (Wimboh, 2017) mengatakan jika peranan GCG sangat berpengaruh dalam membangun fundamental disuatu perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan praktik tata kelola perusahaan yang baik ini tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan membawa dampak pada kinerja keuangan perusahaan. Karena untuk meningkatkan kepercayaan bagi para investor, kinerja keuangan pada laporan keuangan tahunan perusahaan harus sesuai dengan prinsip GCG yaitu *transparency* dan *accountability*. Menurut Butt & Hasan (2009), penerapan pada tata kelola perusahaan ini juga mampu memberikan kepercayaan dari investor, kreditor, maupun pemegang saham yang ingin berinvestasi didalamnya.

Kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran atas keadaan dan kondisi yang terjadi didalam perusahaan dalam periode tertentu (Sawir, 2005). Pengukuran atas kinerja keuangan dilakukan karena untuk melihat apakah perusahaan telah mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran terhadap kinerja keuangan ini dilihat melalui laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu.

Didalam PSAK No. 1 2005 berisikan jika laporan keuangan adalah bentuk penyajian yang tersusun pada posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Terdapat contoh kasus yang menimpa pada perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Xerox Corporation, Enron, dan WorldCom dimana perusahaan besar ini telah melakukan bentuk tindakan kecurangan yang dengan melibatkan penyalahgunaan pada pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar ini berhasil mengecoh para investor dengan menampilkan kinerja keuangan mereka dalam keadaan yang baik. Tindakan manipulasi yang dilakukan adalah dengan menyajikan laba selama 5 tahun sehingga menghasilkan pendanaan sebesar \$ 6 Miliar. Dan perusahaan besar ini dinyatakan telah menyalahi aturan hukum dan standar laporan keuangan yang berlaku (Ejoh & Ejom, 2014).

Menurut Angrijani dan Zakaria (2016) dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, manajemen akan membuat penilaian terhadap entitas (kinerja keuangan perusahaan) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kinerja keuangan merupakan salah satu bagian pada laporan keuangan karena didalamnya laporan menyajikan seluruh informasi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Karena itu, perlu adanya pihak independen yaitu auditor eksternal untuk memberikan penilaian kepada perusahaan yaitu opini audit. Opini audit ini akan mengkondisikan perusahaan yang sesungguhnya dan digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak yang terkait. Apabila opini audit di suatu perusahaan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka reputasi perusahaan dimata publik akan menjadi bagus dan juga banyak investor yang berkeinginan untuk berinvestasi didalamnya (Suryanto & Grima, 2018).

Penelitian pada *good corporate governance*, *financial performance*, dan opini audit sangat menarik apabila dibahas pada perusahaan yang berada pada sektor *real estate*, properti, dan konstruksi. Subyek yang akan dibahas bukan mengenai inventory akan tetapi lebih mengarah pada pemberian opini oleh auditor eksternal terhadap perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan dengan prinsip keterbukaan dan tanggungjawab dari pihak yang terkait.

Pada penelitian sebelumnya, hubungan antara *good corporate governance* dan *financial performance* (Mahrani & Soewarno, 2018 dan Wahyudin & Solikhah, 2017) memiliki hubungan signifikan, namun pada penelitian (Ajili &

Bouri, 2018; Price et al., 2011; Al-Tamimi, 2012 dan Akbar et al.,2016) memiliki hubungan yang tidak signifikan. Lalu hubungan antara *financial performance* dan opini audit (Putry & Badrudin, 2017; Rudkhani & Jabbari, 2013; Mutchler, 1985; Butler et al., 2004 dan Gaganis et al.,2017) memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan hubungan antara *good corporate governance* dan opini audit (Chandra, 2013; Garcí'a-Meca, 2005 dan Ramdhany, 2004) terdapat pengaruh yang tidak signifikan. Indikator variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jumlah komite audit dan proporsi dewan komisaris independen pada penilaian *good corporate governance*; *Return on Equity* (ROE), *Earning per Shares* (EPS), dan *Return on Asset* (ROA) untuk penilaian *financial performance*; dan (*unqualified opinion*) diberi angka 1 dan (*qualified opinion*) diberi angka 0 untuk menilai jenis opini audit perusahaan.

Maka dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017 dan lebih memfokuskan pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi. Berdasarkan penjelasan dan kajian penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk membahas lebih panjang dengan judul penelitian ***“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Opini Audit dengan Financial Performance sebagai variabel intervening pada sektor property, real estate, dan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan dari masalah ini adalah :

1. Apakah *Good Corporate Governance* mempengaruhi *Financial Performance* pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Financial Performance* mempengaruhi Opini Audit pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Good Corporate Governance* mempengaruhi Opini Audit pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan *Good Corporate Governance* mempengaruhi *Financial Performance* pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?
2. Untuk mengetahui hubungan *Financial Performance* mempengaruhi Opini Audit pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?
3. Untuk mengetahui hubungan *Good Corporate Governance* mempengaruhi Opini Audit pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI?

1.4. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya difokuskan pada sektor *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015 hingga 2017. Selain itu, *board of director* dan *audit committee* hanya digunakan sebagai salah satu faktor dari *Good Corporate Governance* untuk melihat pengaruh dari pemberian Opini Audit.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini semoga dapat menjadi manfaat bagi rekanan yang berkaitan, diantaranya :

1. Bagi perusahaan, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan *Financial Performance* yang dapat mempengaruhi pemberian Opini Audit.
2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran terhadap mahasiswa/i atau pihak lainnya yang menggunakan penelitian ini sebagai penyusunan tugas akhir atau penelitian lainnya mengenai *Good Corporate Governance* dan *Financial Performance* yang dapat mempengaruhi Opini Audit.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang dapat memudahkan pembaca.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini berisi tentang berbagai macam teori yang akan digunakan sebagai dasar dan landasan dalam melakukan penelitian yang disertai dengan definisi dan penjelasan dari setiap variabel dan diikuti dengan model penelitian serta hipotesa yang akan diujikan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Terdiri dari model analisis, definisi operasional variabel, skala pengukuran, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik sampling, unit analisis, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai penjelasan statistik uji hipotesis dan analisa data, hasil pengolahan data, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan mengenai penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN, SARAN, dan KETERBATASAN PENELITIAN

Menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dan pembahasan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan secara umum serta saran yang bisa memberikan masukan bagi penelitian seterusnya atas pembahasan yang telah dilakukan.